

2025

RENCANA KERJA (RENJA)



**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kabupaten Berau
Tahun 2025**

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kabupaten Berau Tahun 2025 dapat terselesaikan. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kabupaten Berau Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Beberapa hal yang diperlukan sebelum dilakukannya Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kabupaten Berau Tahun 2025 adalah :

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
2. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/ atau realisasi APBD.

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan penjabaran dari Renstra yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kabupaten Berau, yang selanjutnya akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis dan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, dan target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kabupaten Berau telah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA DINAS



ZULKIFLI AZHARI,SH,MPA
NIP. 19700902 199603 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KABUPATEN BERAU TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	14
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	16
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRASNSMIGRASI.....	17
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	17
3.2. Tujuan dan Sasaran	21
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	26
4.1. Program dan Kegiatan	26
BAB V PENUTUP	27

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Kabupaten Berau Nomor 40 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Kabupaten Berau, tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kabupaten Berau adalah mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya, mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, aset, dan barang persediaan, merumuskan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan hubungan industrial, membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup dinas, mengkoordinasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkupnya.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kabupaten Berau menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan hubungan industrial;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan hubungan industrial;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan hubungan industrial;
- d. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan hubungan industrial;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kabupaten Berau yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kabupaten Berau. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam satu tahun anggaran sekaligus menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Badan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kabupaten Berau diawali dengan persiapan penyusunan renja, dilanjutkan dengan Penyusunan Rancangan Renja, Forum SKPD, dan Penetapan Renja melalui Peraturan Bupati Kabupaten Kabupaten Berau.

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Persiapan Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencakup :

1. Penyusunan rancangan Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang pembentukan tim penyusun Renja;
2. Orientasi mengenai Renja;
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja; dan
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Aktivitas dalam penyusunan Rancangan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah meliputi :

1. Perumusan Rancangan Renja, dan
2. Penyajian Rancangan Renja.

Perumusan rancangan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencakup :

- a) Pengolahan data dan informasi;
- b) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu berdasarkan Renstra;
- c) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- d) Telaahan terhadap rancangan awal Renja;
- e) Perumusan tujuan dan sasaran;
- f) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

- g) Perumusan kegiatan prioritas;

- h) Penyajian awal dokumen rancangan Renja;
- i) Penyempurnaan rancangan Renja;
- j) Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan
- k) Penyesuaian dokumen rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

3. Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Berau berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan. Dalam Forum Perangkat Daerah ini rancangan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibahas, sehingga diperoleh masukan perbaikan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

4. Penetapan Renja SKPD

Pada tahap ini, rancangan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah disempurnakan dan sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki keterkaitan dengan dokumen RKPD Kabupaten Berau, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Renja Kementerian/Lembaga. Penyusunan Renja mengacu pada Rancangan Awal RKPD, dan memperhatikan dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2021-2026 . Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan RKA dan DPA.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah No 56 tahun 2001 tentang pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4124
10. Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 Tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
13. SK Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan LKj-IP.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau tahun 2025 sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ke dalam rencana tahunan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Tujuan

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ke dalam program dan kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program dan kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun 2025;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau tahun 2025 sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan;
 memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan;
- Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 memuat evaluasi pelaksanaan Renja, analisis kinerja, isu-isu penyelenggaraan tugas dan Fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan telaah usulan program dan kegiatan;
- Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 memuat telaah visi misi dan program kepala daerah, telaah renja Kementerian dan Provinsi, penentuan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran strategis;
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; memuat
 program dan kegiatan serta pagu anggaran; dan
- Bab V Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KABUPATEN BERAU TAHUN
LALU

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kabupaten Berau Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kabupaten Berau berjalan dengan baik. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kabupaten Berau mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp. 18.129.392.051,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.141.284.584,00 atau sebesar 89.03%.

Berikut ini diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2023 dan capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kabupaten Berau.

1. Daftar program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.3 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN
 - 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - 3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
 - 3.2 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4.5 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 4.6 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 4.7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5.1 Sub Kegiatan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 5.2 Sub Kegiatan Pengadaan Meubel
 - 5.3 Sub Kegiatan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5.4 Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana pendukung gedung dan bangunan lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - 6.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - 7.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebeul
 - 7.3 Sub Kegiatan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 7.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

II. Program Perencanaan Tenaga Kerja

1. Kegiatan Penyusunan Tenaga Kerja (RTK)
 - 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Tenaga Kerja Makro
 - 1.2 Sub Kegiatan Penyusunan Tenaga Kerja Mikro

III. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
 - 1.1 Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi
 - 1.2 Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja.
2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - 2.1 Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
3. Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
 - 3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegritas
4. Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
 - 4.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada perusahaan kecil
5. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.1 Pengukuran Kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

IV. Program Penempatan Tenaga Kerja

1. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
 - 1.2 Sub kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan jabatan bagi pencari kerja
 - 1.3 Sub Kegiatan Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan

- 1.4 Sub kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja.
2. Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- 2.1 Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
3. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
- 3.1 Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
- 3.2 Sub Kegiatan Job Fair/ Bursa Kerja
4. Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
- 4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran

V. Program Hubungan Industrial

1. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- 1.1 Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
- 1.2 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
2. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
- 2.1 Sub Kegiatan Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan Penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- 2.2 Sub Kegiatan Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- 2.3 Sub Kegiatan Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi
- 2.4 Sub Kegiatan Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit di daerah Kabupaten/Kota.

VI. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

1. Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
- 1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Tanah Pembangunan Kawasan Transmigrasi

VII. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

1. Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- 1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- 1.2 Sub Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi
- 1.3

VIII. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

1. Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada tahap Kemandirian
- 1.1 Sub Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Tahun 2025

- Dari semua program/kegiatan yang ada terdapat satu program yang masih belum tercapai kinerjanya yaitu program penempatan tenaga kerja, hal ini terjadi karena pencari kerja yang terdaftar AK1 yang bekerja atau ditempatkan sedikit .
- Dan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi, dikarenakan di Kabupaten Berau masih belum ada BLK (Balai Latihan Kerja).
- Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan yaitu sebagai berikut:
 - a. Komitmen dan kerjasama dari pimpinan unit, pelaksana kegiatan, pejabat pengadaan barang dan jasa sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan waktu yang telah ditetapkan.
 - b. Dukungan Perangkat Daerah terkait dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau.
 - Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja/hasil pada program penempatan tenaga kerja yaitu pencari kerja yang mendaftar AK1 tidak melaporkan apakah mereka ditempatkan atau belum padahal sudah diingatkan oleh petugas dinas untuk melaporkan kepada dinas .
 - Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten Kabupaten Berau. Capaian renstra secara umum telah berjalan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa perbaikan kedepannya.

- Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil pada penyusunan Renja tahun 2025 yaitu perlu dilakukan sinkronisasi kegiatan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung capaian target kinerja.

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau s/d Tahun 2024 terlihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Tahun 2023 s/d 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2024	
		K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
3	4	13 = 12/7*100		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100	
WAJIB																	
URUSAN WAJIB DASAR																	
Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		98		10.753.191.851		3.086.802.996		833.533.411		1.927.851.324	6.431	4.126.639.380		9.974.827.111			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		99		369.017.400		22.334.678		6		64.844.290	21	277.767.832		364.946.806			
Penyusunan Dokumen Perencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	250	43.914.006	12	112.080.600	3	12.175.021	3	3	24.892.477	3	74.983.541	9	112.051.042	75	99,97	
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	250	42.633.836	12	79.001.800	3	10.159.657	3	3	12.442.997	3	55.782.552	9	78.385.209	75	99,22	
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	148.175.000	45	177.935.000	5	0	10	0	15	27.508.816	15	147.001.739	45	174.510.555	100	98,08
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		75,25		7.289.963.551		2.559.611.178		833.533.405		1.439.083.383	41	1.881.720.294		6.713.948.260			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	250	4.325.433.078	41	5.889.353.551	41	2.037.599.915	41	748.847.813	41	1.132.228.487	41	1.515.330.398	41	5.434.006.613	100	92,27
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	250	1.226.688.495	10	1.400.610.000	5	522.011.263	1	84.685.592		306.854.896		366.389.896	6	1.279.941.647	60	91,38
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100		202.400.000		0		0		34.617.602	60	153.040.016		187.657.618			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	44.835.000	60	61.500.000	0	0		0		60	61.500.000	60	61.500.000	100	100	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah org yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-	100	101.500.000	10	140.900.000		0		0	34.617.602		91.540.016		126.157.618	0	89,54	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		89		709.810.300		15.874.455		0		109.176.471	5.097	563.260.774		688.311.700			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang	100	11.477.000	5	11.988.000	0	0		0	2.799.000	5	9.189.000	5	11.988.000	100	100	
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100	235.465.800	9	235.659.500	0	3.214.000		0	13.730.000	9	209.574.000	9	226.518.000	100	96,12	
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	155,56	16.409.000	9	8.801.800		0		0	1.160.000	9	7.641.800	9	8.801.800	100	100	
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	80	94.785.000	2.000	110.455.000	0	900.000		0	5.580.000	5.000	103.092.000	5.000	109.572.000	250	99,2	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	73,33	12.768.000	15	17.906.000		0		0		5	9.204.250	5	9.204.250	33,33	51,4	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang2an yang disediakan	100	4.965.000	240	5.000.000	60	360.000	60	0	60	2.940.000	60	1.580.000	240	4.880.000	100	97,6
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	170.000.000	15	320.000.000	3	11.400.455	3	0		9	222.979.724	15	317.347.650	100	99,17	

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Tahun 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2024	
		K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
3	4	13 = 12/7*100		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100	
Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan		100			858.961.700		377.400.000		0		147.470.000	25	274.209.000		799.079.000		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan yang disediakan	100	425.400.000	2	676.694.400	1	377.400.000		0		147.470.000		112.550.000	1	637.420.000	50	94,2
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	100	22.050.000	3	25.766.000		0		0		0	3	25.519.000	3	25.519.000	100	99,04
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	100	39.700.000	22	14.767.800		0		0		0	22	14.640.000	22	14.640.000	100	99,13
Pengadaan Saranan dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				10	141.733.500		0		0		0		121.500.000	0	121.500.000		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100			275.450.300		69.962.485		0		81.117.850	1.181	96.734.955		247.815.290		
Penyediaan Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	2.906.500	1.200	3.194.000	38	1.400.000		0		0	1.172	1.590.000	1.210	2.990.000	100,83	93,61
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100	251.576.881	12	263.997.700	3	68.562.485	3	0	3	76.237.850	3	92.069.955	12	236.870.290	100	89,72
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100		22	8.258.600	6	0	6	0	6	4.880.000	6	3.075.000	24	7.955.000	109,09	96,32
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		92			1.047.588.600	0	41.620.200	0	0	0	51.541.728	6	879.906.509		973.068.437		
Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan	90	122.327.582	30	347.300.000	10	39.520.200	5	0	6	44.566.728	9	191.359.509	30	275.446.437	100	79,31
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	100	14.250.000	5	32.000.000		0		0		0	15	32.000.000	15	32.000.000	300	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	100	14.900.000	16	18.470.000	2	2.100.000		0		6.975.000	16	9.390.000	18	18.465.000	112,5	99,97
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100		1	649.818.600		0		0		0	1	647.157.000	1	647.157.000	100	99,59
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																102,74	94,37
Predikat kinerja																ST	ST
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		100			185.866.000		26.665.697		0		61.015.375	30	93.501.841		181.182.913		
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		100			185.866.000		26.665.697		0		61.015.375	30	93.501.841		181.182.913		
Penyusunan Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	100	75.710.381	1	124.672.000	1	13.743.697		0		2.240.000		44.087.591	1	60.071.288	100	48,18
Penyusunan Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	100	100.685.674	20	61.194.000	5	12.922.000		0		58.775.375	30	49.414.250	35	121.111.625	175	197,91
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																110,61	96,56
Predikat kinerja																ST	ST

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Tahun 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan-Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2024	
		K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
3	4	13 = 12/7*100		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		85			1.455.477.000		104.194.492		105.052.020		560.643.282	54	621.622.744		1.391.512.538		
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		100			1.206.387.000		57.493.830		69.982.020		511.039.156	36	526.594.693		1.165.109.699		
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi tahun n	100	1.160.236.293	120	1.132.207.000	16	42.493.830	16	67.646.020	48	511.039.156	32	474.775.434	112	1.095.954.440	93,33	96,8
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan sektor swasta	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan	100	33.251.458	5	74.180.000	0	15.000.000	1	2.336.000		0	4	51.819.259	5	69.155.259	100	93,23
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		100			45.500.000		10.254.410		510.000		0	4	30.847.507		41.611.917		
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	100	54.904.810	5	45.500.000	1	10.254.410		510.000		0	4	30.847.507	5	41.611.917	100	91,45
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		25			82.960.000		11.529.482		23.720.000		21.676.423	1	15.046.095		71.972.000		
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	25	62.212.354	3	82.960.000	1	11.529.482	1	23.720.000		21.676.423	1	15.046.095	3	71.972.000	100	86,76
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		100			43.250.000		554.000		5.790.000		18.118.821	5	17.690.449		42.153.270		
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	100	57.500.600	15	43.250.000	5	554.000	5	5.790.000		18.118.821	5	17.690.449	15	42.153.270	100	97,46
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100			77.380.000		24.362.770		5.050.000		9.808.882	8	31.444.000		70.665.652		
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya Saing Tenaga Kerja di	100	51.807.901	20	77.380.000	4	24.362.770	4	5.050.000	4	9.808.882	8	31.444.000	20	70.665.652	100	91,32
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																116,9	97,32
Predikat kinerja																ST	ST
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		93			1.276.615.200		68.678.324		240.438.585		254.973.359	838	664.813.159		1.228.903.427		
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		36,75			715.509.200		32.837.767		205.585.685		129.917.144	277	323.991.339		692.331.935		
Pelayanan Antarkerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	97,6	108.963.742	120	90.172.000		0		38.132.812		6.840.000	45	44.134.188		89.107.000	0	98,82
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan Lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	97,6		28	63.422.200		0		22.127.040		1.200.000	2	35.883.854		59.210.894	0	93,36
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100		120	215.757.000		0		67.005.719		31.466.540	200	109.968.897		208.441.156	0	96,61
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelayanan antarkerja di Kabupaten	100	136.861.109	30	121.764.000	10	17.808.951	5	24.473.167		10.130.000		62.925.113	15	115.337.231	50	94,72
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	33,33	231.957.647	55	224.394.000		15.028.816	10	53.846.947		80.280.604	30	71.079.287		220.235.654	0	98,15
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1		17,5			96.498.000		29.120.557		0		13.466.738	7	51.494.734		94.082.029		
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai aturan yang berlaku	70		15	96.498.000	4	29.120.557		0	4	13.466.738	7	51.494.734	15	94.082.029	100	97,5
Pengelola Informasi Pasar Kerja		135			319.584.000		0		23.354.900		53.088.385	554	227.016.591		303.459.876		94,95
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	103,53	88.855.225	12	116.802.000	3	0	3	19.814.900	3	40.380.385	3	45.256.476	12	105.451.761	100	90,28
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	208,33	114.695.064	75	202.782.000		0		3.540.000		12.708.000	551	181.760.115	551	0	734,67	0
Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah		20			145.024.000		6.720.000		11.498.000		58.501.092		62.310.495		139.029.587		
Penyediaan Layanan Terpadu pada calon pekerja migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang	20	48.345.489	5	145.024.000		6.720.000		11.498.000		58.501.092	0	62.310.495	0	139.029.587	0	95,87
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																106,21	89,51
Predikat kinerja																ST	T

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Tahun 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2024			
		K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
3	4	13 = 12/7*100		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100			
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		104			3.640.863.600		99.581.099		252.208.933		568.177.820	527	1.951.950.442		2.871.918.294				
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Prjanjian Kerja Bersama		101			2.525.511.600		34.753.446		27.458.000		327.870.940	226	1.370.968.878		1.761.051.264				
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang	100	1.704.526.708	115	224.244.000		16.856.388		25.103.000		59.104.940	225	122.228.790	225	223.293.118	195,65	99,58		
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan	100	173.666.630	1	2.301.267.600		17.897.058		2.355.000		268.766.000	1	1.248.740.088	1	1.537.758.146	100	66,82		
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan		105			1.115.352.000		64.827.653	73	224.750.933	82	240.306.880	301	580.981.564	494	1.110.867.030				
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	100	177.870.433	100	210.614.000	35	30.018.756	45	16.833.000	40	37.026.380	119	126.345.160	239	210.223.296	239	99,81		
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselamatkan	118,18	361.215.164	115	447.715.000	3	12.277.500	28	155.657.575	42	86.662.906	147	193.116.986	220	447.714.967	191,3	100		
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	100	154.859.700	10	197.481.000		22.531.397		22.980.000		72.881.616	34	76.774.080	34	195.167.093	340	98,83		
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	100	231.140.033	1	259.542.000		0		29.280.358		43.735.978	1	184.745.338	1	257.761.674	100	99,31		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)														135,46	90,01				
Predikat kinerja														ST	ST				
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		100			550.047.000		0		50.603.741		75.054.189	12	170.418.000		296.075.930				
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		100			550.047.000		0		50.603.741		75.054.189	12	170.418.000		296.075.930				
Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	30		30	550.047.000	0	0	0	50.603.741	0	75.054.189	12	170.418.000	12	296.075.930	40	53,83		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)														135,13	87,26				
Predikat kinerja														ST	T				
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		300			113.034.600		11.958.180		2.421.000		9.080.000	1	43.966.478		84.149.858				
Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah		200			113.034.600		11.958.180		2.421.000		9.080.000	1	43.966.478		84.149.858				
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan	100		1	92.084.800	1	11.958.180	1	2.421.000	1	9.080.000	1	43.966.478	1	67.425.658	100	73,22		
Penyuluh Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang mendapatkan penyuluhan	200		35	20.949.800		0	10	0	10	0	15	16.724.200	35	16.724.200	100	79,83		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)														131,78	86,29				
Predikat kinerja														ST	T				
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		200			154.296.800		7.316.180		2.102.000		0	20	103.296.333		112.714.513				
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian		70			154.296.800		7.316.180		2.102.000		0	20	103.296.333		112.714.513				
Penguatan SMD dalam rangka kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang dibina	200		50	154.296.800	0	7.316.180	15	2.102.000	15	0	20	103.296.333	50	112.714.513	100	73,05		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)														155,22	83,7				
Predikat kinerja														ST	T				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				Total Anggaran (Rp)										Total Realisasi (Rp)					
				18.129.392.051										16.141.284.584					
																124,26		90,97	
																ST		ST	

b. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau pada tahun 2024 secara keseluruhan relatif baik. Hal ini terlihat dari sebanyak 4 indikator program yang ditargetkan dalam Renja tahun 2024, hanya 1 program yang capaiannya masih dibawah target. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian target kinerja pada urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi tergolong baik.

Secara rinci capaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau disajikan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Kinerja Akhir Renstra (2026)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Renstra Ke-1 (2023)			Target dan Realisasi Kinerja Tahun Renstra Ke-2 (2024)		
					Target Kinerja Renja tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)	Target Kinerja Renja tahun 2024	Realisasi Kinerja Renja tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	Predikat / Nilai Akuntabilitas	Nilai Laporan LKjIP	81,05	84,92	81,90	81,65	96.15	81,90	62.05	76.00

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Tahun 2025

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	13,78	15,20	14,15	12,12	85,65	14,25	12,38	86,88
Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Kinerja Akhir Renstra (2026)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Renstra Ke-1 (2023)			Target dan Realisasi Kinerja Tahun Renstra Ke-2 (2024)		
					Target Kinerja Renja tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)	Target Kinerja Renja tahun 2024	Realisasi Kinerja Renja tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang di Tempatkan	Persen	20	35	25	80	400	30	27	90
Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi yang Ditetapkan	Persen	-	100	100	100	100	100	100	100

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Tahun 2025

Program Pengembangann Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan	Persen	-	100	100	100	100	100	100	100
--------------------------------------------	---------------------------------------------------	--------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

c. **Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Sebelum dirumuskan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

- a. Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :
 - 1) Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar
 - 2) Sarana prasarana penyelenggaraan pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja
 - 3) Sistem informasi ketenagakerjaan belum memadai
 - 4) Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintahan desa tentang program transmigrasi
 - 5) Belum adanya data penunjang yang dapat digunakan sebagai dasar usulan untuk pengembangan kawasan transmigrasi.
- b. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki tantangan untuk mendorong seluruh perangkat daerah dalam memecahkan isu strategis di Kabupaten Berau, meliputi :

 - a) Masih banyaknya jumlah pengangguran yang memiliki pendidikan formal (SMU/SMK/Perguruan Tinggi) yang belum memiliki kualifikasi kompetensi yang diharapkan oleh pasar tenaga kerja/dunia usaha.

- b) Terbatasnya anggaran daerah untuk pelatihan ketenagakerjaan.
 - c) Terbatasnya peluang kesempatan kerja yang tersedia di Kabupaten Kabupaten Berau.
 - d) Tidak tersedianya BLK Balai Latihan Kerja
 - e) Kurangnya Sumber Daya Manusia khususnya Tenaga Instruktur yang memiliki sertifikat kompetensi.
 - f) Minimnya SDM yang menangani ketransmigrasian
- c. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:
- a) Minat/motivasi pencari kerja untuk mengikuti pelatihan yang dilaksanakan di BLK luar.
 - b) Adanya dukungan anggaran pusat untuk percepatan pencapaian pelayanan bidang ketenagakerjaan.
 - c) Terdapat beberapa perusahaan/pengusaha lokal yang mau bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja untuk mempekerjakan pencari kerja yang telah berserifikat kompetensi untuk diangkat sebagai karyawan pada tempat usaha mereka.
 - d) Kondisi keamanan yang relative stabil sehingga tidak ada demo atau kasus yang melibatkan pekerja-pengusaha.
 - e) Dukungan ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk pengembangan pelayanan.
 - f) Terbukanya peluang dan kesempatan masyarakat ekonomi lemah (kurang sejahtera) untuk merubah dan memperbaiki taraf hidup;
 - g) Dana yang tersedia lewat APBD;
 - h) Adanya otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab;
 - i) Adanya koordinasi lintas sektoral/dinas, K/L terkait;
 - j) Adanya jaringan kemitraan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah, Antar Pemerintah Daerah, Antar lintas sektoral dengan masyarakat, lembaga ekonomi, mitra usaha (investor) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM/Organisasi sosial).;
 - k) Meningkatnya kepedulian stakeholder terhadap penyelenggaraan bidang ketransmigrasian;

Beberapa isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing dalam menghadapi pasar kerja dan iklim hubungan industrial yang harmonis dan kondusif.
2. Perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat dan desa eks. Satuan Permukiman transmigrasi dan sekitarnya di kawasan transmigrasi.

d. **Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Berau tahun 2025, secara umum telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terlihat dari rumusan program dan kegiatan dalam rancangan awal RKPD sudah selaras dan anggarannya telah sesuai dengan kebutuhan.

e. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai strategi dalam pencapaian sasaran visi Indonesia 2025, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Pada tahun 2025 pemerintah mempunyai tujuh agenda pembangunan ebagaimana tercantum pada gambar berikut ini:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Isu Strategis nasional yang akan ditangani pada tahun 2025 adalah:

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Hal Kesehatan dan Pendidikan
3. Penanggulangan Pengangguran Yang Disertai Decent Job
4. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha
5. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan Dalam Rangka Mendorong Produktivitas
6. Ekonomi Hijau

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 adalah: **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan 7 Prioritas Nasional. Tujuh Prioritas Nasional tahun 2025 yang merupakan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2025, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan 2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Dalam lima tahun mendatang (2020-2024), sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu "Menurunnya kesenjangan antar wilayah Kalimantan Timur.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Sasaran dari prioritas Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, meliputi:

- a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan
- b. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk
- c. Terpenuhinya layanan dasar
- d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda
- e. Terwujudnya pengentasan kemiskinan
- f. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan memiliki sasaran sebagai berikut:

- a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya
- b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan
- c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial
- d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat
- e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa
- f. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif.

Arah Kebijakan pembangunan nasional tahun 2025, meliputi:

- a. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan
- b. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job
- c. Mendorong pemulihan dunia usaha
- d. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
- e. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
- f. Percepatan Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
- g. pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi

3.2. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kabupaten Berau Tahun 2025

Pada tahun 2025 ini fokus pembangunan Kabupaten Kabupaten Berau berdasarkan isu strategis daerah, yaitu:

1. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter budaya melayu
2. Penanganan pandemi akibat covid-19
3. Kemandirian masyarakat ekonomi berbasis masyarakat, terutama di sektor kemaritiman dan pariwisata
4. Akselerasi pembangunan wilayah Kabupaten Berau sebagai kawasan strategis perbatasan nasional

5. Peningkatan pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah
6. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi komunikasi
7. Penurunan kualitas lingkungan hidup
8. Implementasi Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik)

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa depan dengan lebih mengoperasionalkan pelaksanaan misi. Tujuan juga mencerminkan adanya prioritas program dan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui perumusan tujuan diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai ke depan atau mengarahkan perumusan sasaran tahunan, arah kebijaksanaan, program serta kegiatan. Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau konsisten dengan tugas pokok dan fungsinya secara kolektif menggambarkan arah strategisnya dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan demikian Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 tahun guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 tahun ke depan. Indikator kinerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran.

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistim pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator kinerja masukan dan keluaran dapat dinilai sebelum kegiatan selesai, karena masukan adalah semua bahan termasuk orang, material, alat, dan uang yang digunakan dalam proses untuk menghasilkan output. Sedangkan keluaran adalah suatu wujud atau keadaan yang diciptakan melalui proses yang mempunyai nilai tambah untuk dimanfaatkan.

Untuk indikator hasil, manfaat, dan dampak akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan. Hasil adalah kegunaan langsung dari output atau manfaat suatu output ditinjau dari maksud atau sasaran output tersebut dihasilkan, manfaat adalah kegunaan lebih lanjut yang diharapkan dikaitkan dengan tujuan jangka menengah. Sedangkan dampak adalah kegunaan akhir dari output yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang atau tujuan akhir.

Penetapan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kabupaten Berau untuk periode Renstra 2021-2026, beserta indikator capaiannya diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai.

Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kabupaten Berau adalah Meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja melalui peningkatan keterampilan bagi pencari kerja. Sedangkan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kabupaten Berau adalah Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja.

Tabel tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

TUJUAN	SASARAN	SRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM
Misi 1. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur				
Mewujudkan Tenaga Kerja yang terampil/ kompeten dan Produktif yang cerdas, sehat, sejahtera bermartabat dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya keterampilan/ kompetensi tenaga kerja dan produktivitas kerja	Peningkatan kompetensi dan keterampilan Tenaga Kerja	- Melaksanakan Pelatihan - Melaksanakan Pembinaan pada lembaga - lembaga pelatihan	- Kerjasama dengan Lembaga- lembaga Pelatihan Pemerintah dan Swasta
	Meningkatnya Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja Lokal	- Update berkala tentang Informasi Bursa Kerja serta Lapangan Kerja yang tersedia	- Kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan Swasta
	Meningkatnya Kondisi Hubungan Industrial yang kondusif dan Kesejahteraan Pekerja	Peningkatan Hubungan Industrial	- Optimalisasi Penyelesaian Hubungan antara pekerja dan pengusaha - Pemberian Perlindungan Hukum kepada Pengusaha dan Pekerja - Pelaksanaan Peraturan UMK dan jaminan soisal ketenagakerjaan	- Optimalisasi Penerapan Undang-undang Ketenagakerjaan
	Meningkatnya Kontribusi Transmigrasi terhadap PDRB	Peningkatan taraf hidup masyarakat di kawasan Transmigrasi	- Membangun Sarana Umum Bidang Sosial Ekonomi di kawasan Transmigrasi	- Meningkatkan Pembinaan Sosial Ekonomi di Pemukiman Transmigrasi
	Tersedianya peralatan pelatihan, pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja	Pembangunan Balai Latihan Kerja	- Membangun Balai Latihan Kerja	- Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat usia Produktif untuk mengikuti pelatihan melalui Balai Latihan Kerja.

Tabel 3.2

**Tujuan dan Sasaran beserta Program Tahun 2025 Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kabupaten Berau**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan Tenaga Kerja yang Terampil/ Kompeten dan Produktif yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	70	70	75	75	75
			Persentase tenaga kerja lokal yang ditempatkan (persen)	20	25	25	30	30
		Meningkatnya keterampilan/ kompetensi tenaga kerja dan produktivitas kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan	60	80	100	120	150
		Meningkatnya Kondisi Hubungan Industrial yang kondusif dan Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Konflik yang terfasilitasi (persen)	80	80	85	85	90
		Meningkatnya Kontribusi Transmigrasi terhadap PDRB	Jumlah UPT yang dibina dan di monitor	35	35	35	35	35

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kabupaten Berau pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

- a. Mengarah pada urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kabupaten Berau tahun 2021-2026,
- b. Mengarahkan pada penanganan permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kabupaten Berau sebagaimana tertuang dalam Renstra tahun 2021-2026.

Secara rinci program dan kegiatan serta Pagu Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kabupaten Berau tahun 2025 tertuang dalam Tabel berikut ini (Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026).

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kabupaten Berau Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja guna mendukung pencapaian visi Kabupaten Kabupaten Berau tahun 2021-2026.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pjabat struktural di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar mengawal pelaksanaan Renja tahun 2025 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2025 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2025.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan program dan kegiatan Renja tahun 2025 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Kepala Dinas dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025 guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik.

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Tahun 2025

Dengan adanya Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan pada urusan ketenagakerjaan dan urusan transmigrasi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan perangkat daerah yang lain. Semoga dengan tersusunnya Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kabupaten Berau Tahun 2025, mendorong peningkatan kualitas kinerja dapat perannya sebagai perangkat daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan dan urusan t r a n s m i g r a s i . Selain itu, diharapkan Rencana Kerja tahun 2025 ini mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuta yang telah ditetapkan dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026.

Tanjung Redeb, Januari 2025

Kepala Dinas,



H. Zulkifli Azhari, SH, M.A.P

NIP. 19700902 199603 1 001

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET
1	2	3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.361.451.979	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	289.998.172	
- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	104.998.586	3 Doc
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja SKPD	54.999.691	12 Laporan
- Evaluasi kinerja perangkat daerah	129.999.895	15 Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.844.848.584	
- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	5.624.558.584	41 Orang/bln
- Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1.220.290.000	12 Doc
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110.000.000	
- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	30.000.000	1 Paket
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	80.000.000	7 Orang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	248.910.607	
- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	5.985.000	6 Paket
- Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.996.910	6 Paket
- Penyediaan peralatan rumah tangga	5.992.048	9 Paket
- Penyediaan bahan logistik kantor	49.942.000	60 Paket
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.994.649	15 Paket
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	5.000.000	240 Doc
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dn konsultasi SKPD	120.000.000	40 Laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	369.291.816	
- Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	350.000.000	2 Unit
- Pengadaan Meubel	9.782.466	5 Unit
- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	9.509.350	4 Unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.977.800	
- Penyediaan Surat Menyurat	2.982.000	1 Laporan
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	209.995.800	12 Laporan

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Tahun 2025

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET
1	2	3
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	285.425.000	
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.500.000	22 Unit
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	3 Unit
- Pemeliharaan mebel	16.000.000	5 Unit
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	15.930.000	16 Unit
- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	74.995.000	1 Unit
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	150.000.000	-
Penyusunan Tenaga Kerja (RTK)	150.000.000	
- Penyusunan tenaga kerja makro	50.000.000	1 Doc
- Fasilitas Penyusunan tenaga kerja mikro	100.000.000	6 Orang
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.489.994.995	-
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	2.249.998.870	-
- Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	2.199.999.270	100 Orang
- koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	49.999.600	3 Lembaga
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	49.999.477	-
- Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	49.999.477	3 Lembaga
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	79.999.182	-
- Penyediaan sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	79.999.182	3 Perizinan
Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	49.999.650	-
- Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	49.999.650	5 Perusahaan
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59.997.816	-
- Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	59.997.816	1 Doc

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Tahun 2025

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET
1	2	3
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.299.999.540	-
Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	774.999.540	-
- Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	175.000.000	14 Orang
- Pelayanan Antar Kerja	70.000.000	80 Orang
- Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi Pencari Kerja	250.000.000	560 Orang
- Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	80.000.000	8 Orang
- Perluasan kesempatan kerja	199.999.540	30 Orang
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	-
- Pengawasan dan pengendalian LPTKS	65.000.000	10 Lembaga
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	340.000.000	-
- Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	115.000.000	12 Laporan
- Job fair/bursa kerja	225.000.000	75 Orang
Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000	-
- Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran	120.000.000	13 Orang
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.996.997.558	-
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.314.999.483	-
- Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	134.999.900	50 Perusahaan
- Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan	2.179.999.583	12 Laporan
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial , Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah Kabupaten/Kota.	681.998.075	-
- Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota	179.999.780	50 Perkara
- Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota	241.998.895	115 Perkara
- Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi	99.999.800	25 Asosiasi dan Serikat Pekerja
- Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit di daerah kabupaten/kota	159.999.600	1 Lembaga
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	297.690.910	-
- Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	297.690.910	-
- Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	297.690.910	1 Doc
- Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	352.308.696	22 Hektar
- Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	29.999.944	1 Doc
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	34.999.985	-
Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	34.999.985	-
- Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	34.999.985	1 Laporan
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	39.999.845	-
Pengembangan Satuan permukiman pada tahap kemandirian	39.999.845	-
- Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	39.999.845	20 KK
JUMLAH	15.671.134.812	-

